



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, dilakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana DI 310 yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH);
- c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari program PTSL.
11. Tempat-tempat yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

15. Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIBPHTB adalah Sistem Informasi yang terintegrasi untuk melayani semua kebutuhan pengelolaan BPHTB berbasis teknologi komputer.
16. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kantor ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang.
17. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

## BAB II PEMUNGUTAN BPHTB

### Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan BPHTB diserahkan kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima pembayaran BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima atau menolak permohonan pengurangan BPHTB;
  - c. menyetorkan penerimaan BPHTB ke kas umum daerah;
  - d. menerbitkan dokumen BPHTB; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d setiap bulan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dokumen BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Validasi BPHTB

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB melalui Aplikasi SIBPHTB yang difasilitasi oleh Kantor ATR/BPN.
- (2) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
  - b. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah dan/atau bangunan yang dimohonkan program PTSL;
  - c. fotokopi KTP pemohon PTSL; dan
  - d. fotokopi surat keterangan perolehan hak dari wajib pajak yang diketahui kepala desa/lurah wilayah objek pajak.
- (3) BPPKAD melakukan validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kantor ATR/BPN mencetak SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh BPPKAD sebagai dasar pembayaran BPHTB.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai berkas untuk perubahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### BAB III BESARAN BPHTB

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak pada saat perolehan.
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak lebih rendah dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 6

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (2) BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena selain waris dan hibah wasiat sebesar 100% (seratus persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (3) Terhadap BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena selain waris dan hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pengurangan atau keringanan.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 8

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran BPHTB yang terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak SSPD BPHTB selesai divalidasi.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau tempat-tempat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tempat-tempat yang ditunjuk, penyetoran penerimaan pembayaran BPHTB dilakukan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB V  
TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

Pasal 9

Wajib Pajak diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
  2. Wajib Pajak telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik sebelum Tahun 2011 atau saat diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
  1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak.
  2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
  3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta.
  4. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah.
  5. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan.
  6. Wajib Pajak yang termasuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 10

Besaran pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dan huruf b angka 6.
- b. 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan huruf c.

- c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan huruf b angka 4.
- d. 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dan huruf b angka 5.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan BPHTB melalui Aplikasi SIBPHTB yang difasilitasi oleh Kantor ATR/BPN.
- (2) BPPKAD melakukan validasi pengurangan BPHTB dan menetapkan besaran pengurangan BPHTB.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Wajib Pajak yang mempunyai sertifikat hasil program PTSL yang terbit sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan kewajiban pembayaran BPHTB belum dilaksanakan menyampaikan permohonan SSPD BPHTB melalui SIBPHTB sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 196807301997032003



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 51 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA  
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
 LENGKAP (PTSL)

DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1

	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH                  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN                  (SSPD - BPHTB)</b></p>	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :																				
<p><b>BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK                  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</b></p>																						
<p>A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat : <input type="text"/> Blok/Kav/Nomor :</p> <p>4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 5. RT/RW : <input type="text"/> 6. Kecamatan : <input type="text"/></p> <p>7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/> 8. Kode Pos : <input type="text"/></p>																						
<p>B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/></p> <p>3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 4. RT/RW : <input type="text"/></p> <p>5. Kecamatan : <input type="text"/> 6. Kabupaten/Kota : <input type="text"/></p> <p>Penghitungan NJOP PBB : <input type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th style="width: 25%;">NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)</th> <th style="width: 25%;">Luas x NJOP PBB/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah(bumi)</td> <td>7. <input type="text"/> m2</td> <td>9. Rp <input type="text"/></td> <td>11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8. <input type="text"/> m2</td> <td>10. Rp <input type="text"/></td> <td>12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td>13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB APHB :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/> 14. Harga transaksi/Nilai Pasar Rp <input type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/></p>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2	Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small>	NJOP PBB :			13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small>	NJOP PBB APHB :			<input type="text"/>
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2																			
Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>																			
Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small>																			
NJOP PBB :			13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small>																			
NJOP PBB APHB :			<input type="text"/>																			
<p>C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14</td> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 25%;">&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>2.</td> <td>&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td>3.</td> <td>&gt; Rp <input type="text"/> <small>angka 1 - angka 2</small></td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>4.</td> <td>&gt; Rp <input type="text"/> <small>5 % angka 3</small></td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)</td> <td>5.</td> <td>&gt; Rp <input type="text"/> <small>50 % x angka 4</small></td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td>6.</td> <td>&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp <input type="text"/>	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp <input type="text"/>	3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp <input type="text"/> <small>angka 1 - angka 2</small>	4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp <input type="text"/> <small>5 % angka 3</small>	5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)	5.	> Rp <input type="text"/> <small>50 % x angka 4</small>	6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp <input type="text"/>		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp <input type="text"/>																				
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp <input type="text"/>																				
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp <input type="text"/> <small>angka 1 - angka 2</small>																				
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp <input type="text"/> <small>5 % angka 3</small>																				
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)	5.	> Rp <input type="text"/> <small>50 % x angka 4</small>																				
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp <input type="text"/>																				
<p>D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> d. ....</p> <p><i>*) Coret yang tidak perlu</i></p>																						
<p>JUMLAH SETOR (dengan angka) <input type="text"/> (dengan huruf) <input style="width: 300px; height: 30px;" type="text"/></p> <p>(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																						
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Kota Mungkid, tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR																				
Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																						
Nama lengkap, dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan																				
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD	Nomor Dokumen <input type="text"/>	NOP PBB Baru <input type="text"/>																				


Keterangan:

Lembar SPPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara



2. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 2


	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</b></p> <p>BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :																				
<p>A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat : <input type="text"/> Blok/Kav/Nomor : <input type="text"/></p> <p>4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 5. RT/RW : <input type="text"/> 6. Kecamatan : <input type="text"/></p> <p>7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/> 8. Kode Pos : <input type="text"/></p>																						
<p>B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/></p> <p>3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 4. RT/RW : <input type="text"/></p> <p>5. Kecamatan : <input type="text"/> 6. Kabupaten/Kota : <input type="text"/></p> <p>Penghitungan NJOP PBB : <input type="text"/></p>																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Uraian</th> <th style="width:25%;">Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th style="width:25%;">NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)</th> <th style="width:25%;">Luas x NJOP PBB/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah(bumi)</td> <td>7. <input type="text"/> m2</td> <td>9. Rp <input type="text"/></td> <td>11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8. <input type="text"/> m2</td> <td>10. Rp <input type="text"/></td> <td>12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td>13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB APHB :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/> 14. Harga transaksi/Nilai Pasar <input type="text"/> Rp</p> <p>16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/></p>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2	Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small>	NJOP PBB :			13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small>	NJOP PBB APHB :			<input type="text"/>
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2																			
Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>																			
Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small>																			
NJOP PBB :			13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small>																			
NJOP PBB APHB :			<input type="text"/>																			
<p>C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14</td> <td style="width:10%; text-align: center;">1.</td> <td style="width:20%; text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*</td> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp	3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp	4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp	5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*	5.	> Rp	6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp																				
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp																				
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp																				
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp																				
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*	5.	> Rp																				
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp																				
<p>D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/ SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/>% berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> d. ....</p> <p><i>*) Coret yang tidak perlu</i></p>																						
<p>JUMLAH SETOR (dengan angka) <input type="text"/> (dengan huruf) <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> Rp (berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																						
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG   _____ Nama lengkap, dan tanda tangan	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: _____  _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	Kota Mungkid, tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR  _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan																			
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD	Nomor Dokumen <input type="text"/>	NOP PBB Baru <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>															

Keterangan:

Lembar SSPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

3. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 3


	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</b>	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :	
	BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)		
A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/>			
2. NPWP : <input type="text"/>			
3. Alamat : <input type="text"/>			
4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/>			
Blok/Kav/Nomor : <input type="text"/>			
5. RT/RW : <input type="text"/>			
6. Kecamatan : <input type="text"/>			
8. Kode Pos : <input type="text"/>			
B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/>			
2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			
3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
4. RT/RW : <input type="text"/>			
5. Kecamatan : <input type="text"/>			
6. Kabupaten/Kota : <input type="text"/>			
Penghitungan NJOP PBB : <input type="text"/>			
	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2
Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> <small>angka 8x angka 10</small>
		NJOP PBB :	13. Rp <input type="text"/> <small>angka 11+ angka 12</small>
		NJOP PBB APHB :	<input type="text"/>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			14. Harga transaksi/Nilai Pasar <input type="text"/> Rp
16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/>			
C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14			1. > Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2. > Rp
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			3. > Rp <small>angka 1 - angka 2</small>
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. > Rp <small>5 % angka 3</small>
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)			5. > Rp <small>50 % x angka 4</small>
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6. > Rp
D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)			
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/ SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor:			
<input type="checkbox"/> d. ....			
*) Coret yang tidak perlu			
JUMLAH SETOR (dengan angka)		(dengan huruf)	
Rp <input type="text"/>		<input style="width:100%; height: 20px;" type="text"/>	
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)			
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Kota Mungkid, tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR	Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<input type="text"/> Nama lengkap, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD	Nomor Dokumen <input type="text"/>		
	NOP PBB Baru <input type="text"/>		

Keterangan:

Lembar SSPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 4


	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</b></p> <p>BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>	<p>No. Daftar: kode Bayar/NTPD :</p>																									
<p>A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat : <input type="text"/> Blok/Kav/Nomor : <input type="text"/></p> <p>4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 5. RT/RW : <input type="text"/> 6. Kecamatan : <input type="text"/></p> <p>7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/> 8. Kode Pos : <input type="text"/></p>																											
<p>B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/></p> <p>3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/> 4. RT/RW : <input type="text"/></p> <p>5. Kecamatan : <input type="text"/> 6. Kabupaten/Kota : <input type="text"/></p> <p>Penghitungan NJOP PBB : <input type="text"/></p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th style="width: 10%;">Luas</th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)</th> <th style="width: 10%;">Luas x NJOP PBB/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah(bumi)</td> <td>7.</td> <td><input type="text"/> m2</td> <td>9. Rp <input type="text"/></td> <td>11. Rp <input type="text"/> angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8.</td> <td><input type="text"/> m2</td> <td>10. Rp <input type="text"/></td> <td>12. Rp <input type="text"/> angka 8x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td>13. Rp <input type="text"/> angka 11+ angka 12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">NJOP PBB APHB :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/> 14. Harga transaksi/Nilai Pasar <input type="text"/> Rp <input type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/></p>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	Luas	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2	Tanah(bumi)	7.	<input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> angka 7 x angka 9	Bangunan	8.	<input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> angka 8x angka 10	NJOP PBB :				13. Rp <input type="text"/> angka 11+ angka 12	NJOP PBB APHB :				<input type="text"/>
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	Luas	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2																							
Tanah(bumi)	7.	<input type="text"/> m2	9. Rp <input type="text"/>	11. Rp <input type="text"/> angka 7 x angka 9																							
Bangunan	8.	<input type="text"/> m2	10. Rp <input type="text"/>	12. Rp <input type="text"/> angka 8x angka 10																							
NJOP PBB :				13. Rp <input type="text"/> angka 11+ angka 12																							
NJOP PBB APHB :				<input type="text"/>																							
<p>C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/> angka 1 - angka 2</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/> 5 % angka 3</td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)</td> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/> 50 % x angka 4</td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">&gt; Rp <input type="text"/></td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp <input type="text"/>	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp <input type="text"/>	3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp <input type="text"/> angka 1 - angka 2	4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp <input type="text"/> 5 % angka 3	5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)	5.	> Rp <input type="text"/> 50 % x angka 4	6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp <input type="text"/>							
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	> Rp <input type="text"/>																									
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	> Rp <input type="text"/>																									
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3.	> Rp <input type="text"/> angka 1 - angka 2																									
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	> Rp <input type="text"/> 5 % angka 3																									
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)	5.	> Rp <input type="text"/> 50 % x angka 4																									
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6.	> Rp <input type="text"/>																									
<p>D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/ SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/>% berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> d. ....</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>																											
<p>JUMLAH SETOR (dengan angka) <input type="text"/> (dengan huruf) <input type="text"/></p> <p>Rp <input type="text"/> (berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																											
<p>MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG</p> <p>_____ Nama lengkap, dan tanda tangan</p>	<p>DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: _____</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>	<p>Kota Mungkid, tgl.....</p> <p>_____ Wajib Pajak / PENYETOR</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>	<p>Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>																								
<p>Hanya diisi oleh petugas BPPKAD</p>	<p>Nomor Dokumen <input type="text"/></p> <p>NOP PBB Baru <input type="text"/></p>																										

Keterangan:

Lembar SSPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

5. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 5


	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</b>	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :	
	BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)		
A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/>			
2. NPWP : <input type="text"/>			
3. Alamat : <input type="text"/>			
Blok/Kav/Nomor :			
4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
5. RT/RW :			
6. Kecamatan : <input type="text"/>			
7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/>			
8. Kode Pos :			
B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/>			
2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			
3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
4. RT/RW :			
5. Kecamatan : <input type="text"/>			
6. Kabupaten/Kota :			
Penghitungan NJOP PBB :			
	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2
Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. Rp	11. Rp <input type="text"/> angka 7 x angka 9
Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. Rp	12. Rp <input type="text"/> angka 8x angka 10
NJOP PBB :			13. Rp <input type="text"/> angka 11+ angka 12
NJOP PBB APHB :			<input type="text"/>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			14. Harga transaksi/Nilai Pasar <input type="text"/> Rp
16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/>			
C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14			1. > Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2. > Rp
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			angka 1 - angka 2 3. > Rp
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang			5 % angka 3 4. > Rp
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)			50 % x angka 4 5. > Rp
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6. > Rp
D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)			
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/ SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor:			
<input type="checkbox"/> d. ....			
*) Coret yang tidak perlu			
JUMLAH SETOR (dengan angka) <input type="text"/> (dengan huruf) <input style="width: 300px; height: 30px;" type="text"/>			
Rp <input type="text"/> (berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)			
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Kota Mungkid, tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR	Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
_____ Nama lengkap, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD	Nomor Dokumen <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	NOP PBB Baru <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Keterangan:

Lembar SSPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

6. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 6

	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</b>	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :	
	BEFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)		
A 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/>			
2. NPWP : <input type="text"/>			
3. Alamat : <input type="text"/>			
Blok/Kav/Nomor : <input type="text"/>			
4. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
5. RT/RW : <input type="text"/>			
6. Kecamatan : <input type="text"/>			
7. Kabupaten/Kota : <input type="text"/>			
8. Kode Pos : <input type="text"/>			
B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/>			
2. Letak tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			
3. Kelurahan/Desa : <input type="text"/>			
4. RT/RW : <input type="text"/>			
5. Kecamatan : <input type="text"/>			
6. Kabupaten/Kota : <input type="text"/>			
Penghitungan NJOP PBB : <input type="text"/>			
	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya pembebasan hak/Tahun .....)	Luas x NJOP PBB/m2
Tanah(bumi)	7. <input type="text"/> m2	9. <input type="text"/> Rp	11. <input type="text"/> Rp <input type="text"/> angka 7 x angka 9
Bangunan	8. <input type="text"/> m2	10. <input type="text"/> Rp	12. <input type="text"/> Rp <input type="text"/> angka 8x angka 10
NJOP PBB : <input type="text"/>			13. <input type="text"/> Rp <input type="text"/> angka 11+ angka 12
NJOP PBB APHB : <input type="text"/>			
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			14. Harga transaksi/Nilai Pasar <input type="text"/> Rp
16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/>			
C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14			1. > Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2. > Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			3. > Rp
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. > Rp
5. Pengenaan 50 % karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*)			5. > Rp
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6. > Rp
D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)			
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD /SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor:			
<input type="checkbox"/> d. ....			
*) Coret yang tidak perlu			
JUMLAH SETOR (dengan angka)		(dengan huruf)	
<input type="text"/> Rp		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)			
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MAGELANG	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Kota Mungkid, tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR	Telah Diverifikasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<input type="text"/> Nama lengkap, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	<input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD	Nomor Dokumen	<input type="text"/>	
	NOP PBB Baru	<input type="text"/>	

Keterangan:

Lembar SSPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip
- Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**RATNA YULIANTY, S.H., M.H.**  
 Pembina/Tingkat I  
 NIP. 196807301997032003

